KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

IT4T3UL9

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

,									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 N	A.1 NPWP : 68 807 567 0 722 000								
A.2 NIK :									
A.3 Nama : HADI MAHBUDIANSYAH									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
5 21-402-01			1.250.000	1.250.000	0	15	187.500		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomer Dokumen 026439245708077									
Detailed Reference . Notice Datament							2 0 2 2 yyyy		
								<u> </u>	
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy								
B.10									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
-··· I				RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4			1 2	dd 05 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5				<u> - - - </u>					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya n					ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya	
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	